



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

Edisi II 20 September 2009

Gubernur Lemhannas RI memberikan Kuliah perdana pada Program S-2 dan S-3 di UGM



Kuliah Perdana oleh Prof. DR. MULadi, SH, pada Peserta Program S2 dan S3 Kerjasama Lemhannas RI-UGM tgl 10 September 2009 di Yogyakarta.

DAFTAR ISI

1	Gubernur Lemhannas RI memberikan Kuliah Perdana	1
2	Kebijakan dewan pengarah	2
3	Peserta negara-negara sahabat mengikuti PPRA XLIII Tahun 2009.....	3
4	Pengelolaan Industri Pariwisata harus Profesional	4
5	Pembekalan Nilai-nilai kebangsaan	5
6	Kunjungan Tamu manca negara.....	6
7	Labkurtannas	7
8	Ceramah Gubernur	8
9	Laporan Pelaksanaan Tugas	9
10	Penjajakan Kerjasama Pendidikan Lemhannas RI dengan UNPAD Bandung dan STIA-LAN.....	10
11	Kegiatan Wasrik Internal di Lemhannas RI	10

Di Indonesia, Pertanggung jawaban komandan atau atasan (*Responsibility Of Commanders Or Other Superiors*) yang merupakan tanggungjawab atasan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya, saat ini sangat relevan untuk dibahas.

Menurut Prof. DR. Muladi SH, pada ceramahnya kepada para peserta Program S2 dan S3 di UGM, hal tersebut antara lain, karena : pertanggungjawaban komandan tidak hanya berlaku : a. Di kalangan militer, tetapi juga di lingkungan non-militer (*Civil Authorities*) yaitu atasan, baik polisi maupun sipil lainnya (*Other Superiors*), terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya (*Subordinates*); b. Di masa perang atau konflik bersenjata, tetapi juga bisa terjadi di masa damai dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Namun perlu dicatat, bahwa doktrin pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan (*The Doctrine of command responsibility or superior responsibility rule*) berasal dari hukum militer (*Originated In Military Law*). Di lingkungan militer, pertanggungjawaban komandan berkaitan dengan kepercayaan suci ("*Sacred Trust*"), baik yang mengandung tanggungjawab juridis maupun tanggungjawab moral yang tidak ada bandingannya dengan posisi pimpinan lainnya. Apabila pertanggungjawaban komandan atau atasan lainnya yang bersifat langsung melalui perbuatan positif (*Direct Command Responsibility*) yang berlaku umum telah diatur dalam hukum pidana dalam kerangka "*Deelneming*" Ps. 55 dan Ps. 56 KUHP (penyertaan tindak pidana), maka konsep pertanggungjawaban komandan yang tidak langsung (*Indirect Command Responsibility*) dalam bentuk "*Culpable*

Omission" atau "*Complicity Or Participation By Omission*" yang berlaku secara khusus dalam pelanggaran HAM yang berat (mis. genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan), yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional ternyata telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang bersifat umum, apabila yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat; Namun demikian harus dicatat bahwa persoalan tanggungjawab komandan atau atasan secara khusus memang ditujukan kepada perbuatan "*Omissions*", mengingat perkembangan yang penuh perdebatan dalam hukum internasional maupun polemik yang berkembang dalam hukum nasional. Sekalipun maknanya tidak sesederhana sebagai "*military commanders are responsible for the acts of their subordinates*". Sebenarnya hal ini bukan sebagai suatu hal yang baru, karena pada kira-kira tahun 500 BC, 1. Sun Tzu menulis dalam "*The Art of War*" bahwa : "*When Troop flee, or insubordinate, distressed, collapse in disorder, or are routed, it is the fault of the general. None of these disorders can be attributed to natural causes.*" 2. Napoleon Bonaparte "*There are no bad regiments; they are only bad colonels*", King Charles VII of Orleans telah mengeluarkan Dekrit (1439), Hugo Grotius dalam bukunya yang legendaris "*De Jure Belli Ac Pacis*" (Hukum Damai dan Perang) (1615), King Gustavus Adolphus dari Swedia mengumumkan "*Articles of Military Laws to be Observed in the Wars*", Prof. Albert Lieber, Winthrop, pada akhir abad 19 (1895), dalam tulisannya "*Military Law and Precedents*", dan Brig. Jen Jacob H Smith, pada tahun 1902 menyampaikan hal yang senada dengan masalah ini.

KEBIJAKAN DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENGAJIAN STRATEGIK

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2006 pada pasal 7 tertulis, Dewan Pengarah mempunyai tugas Merumuskan Kebijakan Umum Lemhannas RI. Terkait dengan kurikulum pendidikan dan program pengkajian strategik Lemhannas RI tahun 2010, kebijakan Dewan Pengarah Lemhannas RI sesuai dengan Skep Dewan Pengarah Lemhannas RI Nomor : Skep / 02 / VIII/ 2009 tanggal 27 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :



Prof. DR. Muladi, SH.
Koordinator Dewan Pengarah
Lemhannas RI



Mayjen TNI (Purn.) Albert Inkirowang
Sekretaris Dewan Pengarah
Lemhannas RI



Widodo AS, S.IP
Anggota Dewan Pengarah
Lemhannas RI



DR. Boediono
Anggota Dewan Pengarah
Lemhannas RI



Ir. Aburizal Bakrie
Anggota Dewan Pengarah
Lemhannas RI



Mohamad S. Hidayat
Anggota Dewan Pengarah
Lemhannas RI



Letjen (Purn) Agus Widjojo
Anggota Dewan Pengarah
Lemhannas RI



Prof. Drs. HA. Malik Fadjar
Anggota Dewan Pengarah
Lemhannas RI



Prof. DR. Dorodjatun Kuntorojakti
Anggota Dewan Pengarah

1. KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN LEMHANNAS RI.

- Tenaga Pendidik : 1) Diharapkan rekrutmen para Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kompetensi dan jabatan yang dipangku, 2) Mengoptimalkan pemanfaatan Tenaga Profesional dalam menutup kelemahan pada operasional pendidikan, 3) Mengupayakan untuk para tenaga Pendidik Tamu agar selektif dan memiliki kompetensi tingkat nasional dan global serta tidak bermasalah dengan memanfaatkan tenaga pendidik dari institusi diluar negeri yang sudah ada kerjasama dengan Lemhannas RI.
- Peserta Pendidikan : 1) Dalam rekrutmen agar berpedoman pada peraturan yang berlaku dan adakan sosialisasi dan koordinasi dengan institusi-institusi dan organisasi tingkat nasional yang belum terdaftar menyertakan calon peserta kemudian diupayakan agar calon peserta adalah yang memiliki prospek baik kedepan bagi institusi dan organisasinya, 2) Sosialisasikan pada tahun 2010 dengan Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar di Jakarta agar dalam rekrutmen pendidikan tahun 2011 sudah dapat menyertakan calon peserta Pejabat Pegawai Negeri negara sahabat (Diplomat/Guru Besar).
- Metode Pendidikan : 1) Rancang metode pada tahap Off Campus agar pengendalian dan pengawasan peserta dapat sesuai untuk kesiapan peserta pada tahap On Campus

- Rancang dengan baik agar proses p e m b u a t a n Kertas Karya Peserta (TASKAP) m e r u p a k a n puncak evaluasi p e r o r a n g a n selama mengikuti p e n d i d i k a n , dengan demikian Study Strategis dalam dan luar negeri agar menjadi referensi dalam penyusunan TASKAP, 3) Pada metode ceramah untuk para tenaga pendidik dalam menyiapkan bahan ceramah agar berpedoman pada tujuan pendidikan yaitu menyiapkan kader pimpinan tingkat nasional. Dengan demikian Output dari metode ceramah merupakan bekal bagi para peserta pada saat menghadapi metode Diskusi Panel, Diskusi Kelompok, dan Diskusi antar kelompok, 4) Pada tahun 2010 akan digelar PPRA 44 dan PPRA 45 dan untuk kegiatan utama Olah Sistem Manajemen Nasional (OSMN) agar menggunakan tema Aktual yang berlaku bagi masing-masing PPRA.
- Materi Pendidikan : 1) Content pada keenam materi Core Lemhannas (Ideologi Wawasan Nusantara – Ketahanan Nasional – Kepemimpinan – Sistem Manajemen Nasional- Kewaspadaan Nasional) agar menyesuaikan dengan stratifikasi pendidikan Lemhannas RI, karena para peserta saat mengikuti pendidikan S-1, S-2, dan S-3 serta pendidikan kedinasan PNS dan TNI, Polri secara berjenjang sudah menjalani ke-6 materi core Lemhannas RI, 2) Pada core Kewaspadaan Nasional agar dirancang materi tambahan tentang terorisme termasuk untuk dimasukkan dalam metode ceramah, diskusi panel, diskusi kelompok dan diskusi antar kelompok, 3) Adakan modifikasi pada materi studi strategis dalam negeri dimana para peserta melaksanakan

pengukuran Ketahanan Nasional pada Provinsi selektif, hal mana dihadapkan dengan mulai operasionalnya Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional tahun 2010, 4) Tema Pendidikan untuk PPRA 44 Lemhannas RI tahun 2010 menggunakan core Kewaspadaan Nasional, dan Tema Seminar Pendidikan tentang Terorisme, 5) Tema Pendidikan untuk PPRA 45 Lemhannas RI tahun 2010 menggunakan core Ideologi Pancasila, dan tema Seminar pendidikan merupakan penjabaran dari core Ideologi Pancasila.

- Evaluasi Pendidikan : Sistem evaluasi pendidikan yang telah direvisi pada tahun 2009 agar pada tahun 2010 pada saat sidang Dewan Akademi yang dipimpin oleh Gubernur untuk menetapkan peserta berprestasi (Seroja dan Andalan) untuk presentasi Kertas Karya Perorangan (TASKAP) masing-masing dihadapan sidang Dewan Akademi.

2. KEBIJAKAN PROGRAM PENGAJIAN STRATEGIK LEMHANNAS RI.

- Penugasan dari Dewan Penasehat Presiden bidang Pertahanan dan Keamanan kepada Lemhannas RI untuk mengadakan pengkajian tentang pemekaran daerah.
- Untuk kajian aktual agar Deputi pengkajian Strategik Lemhannas dapat membuat produk tentang "Prioritas Strategi Program 100 hari pertama SBY-BOEDIONO Administration". Untuk dapat dilaporkan kepada bapak SBY-BOEDIONO awal bulan Oktober 2009 sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2009.
- Jadwalkan program kajian dengan berpedoman pada pidato kenegaraan SBY di DPD tanggal 19 Agustus 2009, Dengan Pembangunan Untuk Semua (Development For All) berbasis pada 6 (enam) Strategi Pembangunan.
- Pengkajian tentang Capability Building Pemerintahan Kabinet 2009-2014 hasil Pemilu 2009.
- Rencana Program Pengkajian Strategik tahun 2010 tetap dilaksanakan secara proporsional dan profesional sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun 2009.
- Adakan Kajian Konseptual dan Strategik terhadap Regional and Global Invironments atasantisipasi tahun 2010 -2014 terhadap Pembangunan Nasional.
- Rancang kerjasama dengan Institusi Pengkajian Strategik negara sahabat dalam rangka meningkatkan Tupoksi Lemhannas RI.

PESERTA NEGARA - NEGARA MENGIKUTI PPRA XLIII TAHUN 2009



Penyematan tanda peserta PPRA XLIII kepada perwakilan siswa asing oleh Gubernur Lemhannas RI.



Gubernur Lemhannas RI memberikan ceramah umum dalam rangka SSDN di Provinsi Sumatera Selatan

dan mengatasi krisis dalam negeri, regional maupun Internasional secara utuh, menyeluruh & terpadu berdasarkan permasalahan konstitusi, wasantara dan ketahanan nasional dalam rangka pembangunan nasional juga melaksanakan kajian strategis, baik yang bersifat reaktif maupun antisipatif (*scenario building*).

Sebagai bagian dari kegiatan Program Pendidikan PPRA XLIII baru saja melakukan Studi Strategis Dalam negeri (SSDN) di beberapa Provinsi yaitu : Provinsi Maluku, Provinsi Riau, Provinsi SumSel, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-43 yang sedang berlangsung saat ini di buka oleh Gubernur Lemhannas RI pada tanggal 3 Maret 2009 dengan tema "Pembangunan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional" yang di peruntukkan bagi para pejabat negara dan atau pemerintahan (PNS) setingkat eselon II, Perwira menengah setingkat Kolonel senior TNI/Polri, serta calon Pimpinan tingkat nasional dari Partai Politik, dan Komponen Nasional lainnya. Pendidikan Angkatan XLIII peserta didiknya berbeda dengan pendidikan sebelumnya, karena angkatan ini untuk pertama kalinya diikuti oleh peserta dari mancanegara yaitu dari Australia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Harapan setelah pendidikan peserta dapat melakukan dan menumbuh kembangkan budaya organisasi dan budaya kerjasama (*corporate and cooperate culture*) dalam kerangka pendekatan sistemik guna menjalankan tugas – tugas Negara.

Pendidikan yang dilaksanakan selama 9.5 bulan ini pada dasarnya merupakan jawaban atas fenomena perkembangan yang sangat dinamis dari lingkungan strategis nasional, regional dan global, yang menuntut respons seluruh komponen Bangsa. Tujuan pendidikan adalah menyiapkan dan memantapkan calon Pimpinan tingkat nasional yang memiliki keunggulan Kompetitif (Daya Saing), serta memiliki kemampuan strategis dalam menghayati, mengantisipasi



Peserta PPRA XLIII sedang memberikan cinderamata kepada Wagub Lemhannas RI Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, M.Sc, PhD, sesaat setelah pelaporan hasil SSDN

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA



Keynote Speech Gubernur Lemhannas RI pada acara RTD di ruang Nusantara tanggal 6 Agustus 2009

effect terhadap sektor pariwisata sendiri dan *manufacturing* serta sektor pertanian. Di negara-negara G-20 pariwisata menyumbang 5% terhadap GDP dan merupakan 27% dari total nilai ekspor. Pariwisata pun sangat berkepentingan dengan perubahan iklim (*climate change*) sehingga mampu untuk mengurangi 5% emisi karbon melalui konservasi yang lebih baik, mengurangi kongesti, energi yang terbaharukan, dan *green consumer awareness*. Prospek pariwisata ke depan pun sangat menjanjikan bahkan sangat memberikan peluang besar, terutama apabila menyimak angka - angka perkiraan jumlah wisatawan internasional (*inbound tourism*) berdasarkan perkiraan WTO sebesar 1,046 milyar orang (tahun 2010) dan 1,602 milyar orang (tahun 2020), diantaranya masing-masing 231 juta dan 438 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Dalam *Round Table Discussion (RTD)* yang diselenggarakan Lemhannas 6 Agustus 2009, Dr. Setyanto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti jejak Koizumi, menyiapkan kerangka tinggal landas pariwisata Indonesia terutama setelah terjadinya berbagai musibah teror yang tahun ini ditandai dengan Bom Mega Kuningan atau Bom Marriott II, karena sebenarnya aset pariwisata Indonesia sudah disediakan oleh Sang Maha Pencipta bagi rakyat Indonesia, hanya memerlukan pengelolaan secara profesional saja, untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Hal tersebut sangat penting, sebab Berdasarkan data yang dikutip dari WTO, pada tahun 2000 wisatawan manca negara (*wisman*) internasional mencapai jumlah 698 juta orang yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 476 milyar. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2 % sedangkan pertumbuhan penerimaan dari *wisman* sebesar 7,3 %, bahkan di 28 negara pendapatan tumbuh 15 % per tahun, lanjut Setyanto Khusus untuk jumlah wisatawan dalam negeri di masing-masing negara

jumlahnya lebih besar lagi dan kelompok ini merupakan penggerak utama dari perekonomian nasional. Sebagai gambaran di Indonesia jumlah wisatawan Nusantara (*wisnus*) pada tahun 2000 adalah sebesar 134 juta dengan pengeluaran sebesar Rp. 7,7 triliun. Jumlah ini akan makin meningkat dengan adanya kemudahan untuk mengakses suatu daerah.

Atas dasar angka-angka tersebut maka wajarlah jika pariwisata dikategorikan kedalam kelompok industri terbesar dunia (*the world's largest industry*), sebagaimana dinyatakan pula oleh John Naisbitt dalam bukunya karena 8 % dari ekspor barang - dan jasa, pada umumnya berasal dari sektor pariwisata. Dan pariwisata pun telah menjadi penyumbang terbesar dalam perdagangan internasional dari sektor jasa, kurang lebih 37 %, termasuk 5-top exports categories di 83% Negara WTO, sumber utama devisa di 38% negara dan di Asia Tenggara pariwisata dapat menyumbang 10 -12 % dari GDP serta 7 - 8 % dari total employment. Sedangkan di negara-negara kelompok G-20, pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja 6% dari total lapangan kerja karena mampu memberikan multiplier

Kondisi tersebut akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun pada tahun 2020. Jumlah wisatawan tersebut tampaknya akan dapat dilampaui terutama jika diperhatikan angka pencapaian Kuartal I tahun 2008 di Asia Pacific sudah mencapai 94.273.416 orang (meningkat 8,9% dibandingkan angka tahun 2007 - sumber PATA Strategic Intelligent Centre). Berdasarkan angka perkiraan tersebut, para pelaku pariwisata Indonesia seharusnya dapat melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang besar di kawasan kita. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan "repositioning" keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.

Pembekalan Nilai-nilai Kebangsaan kepada Mahasiswa Universitas Paramadina di Lemhannas RI



Sambutan Deputi Bid. Taplai Bangsa mewakili Gubernur Lemhannas RI pada Pembekalan Mahasiswa Univ. Paramadina

Sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya ke Lemhannas RI, sekitar 200 Mahasiswa Universitas Paramadina mendapatkan pembekalan Nilai-nilai Kebangsaan dengan judul "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi dalam upaya memperkokoh jatidiri bangsa". Ceramah tersebut disampaikan oleh Direktur Program dan Pengembangan Debid Taplai Bangsa, DR. H. Dharma Kusuma, M.Si kepada rombongan mahasiswa Paramadina Jakarta yang berkunjung ke Lemhannas RI pada tanggal 13 Agustus 2009.

Berkaitan dengan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan integrasi nasional dalam konteks NKRI, Lemhannas RI memandang salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat

ini adalah memudarnya wawasan kebangsaan dan rasa bangga sebagai bangsa atau rasa nasionalisme.

Menurunnya rasa nasionalisme suatu bangsa dapat disebabkan oleh hal-hal yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal manakala rasa kebersamaan antara sesama anak bangsa mulai berkurang, seperti memelihara persamaan dalam perbedaan dan memelihara perbedaan dalam persamaan. Bersifat eksternal dapat diidentifikasi dalam bentuk rongrongan dan gangguan dari berbagai kepentingan asing yang bersifat pragmatis, historis, yang bertujuan untuk memecah belah kebangsaan termasuk integritas wilayah, kedaulatan dan kemerdekaan politik nasional.

Berkaitan dengan pengaruh yang bersifat eksternal, globalisasi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, tidak mungkin untuk dihindari. Sebagai konsekwensi pergaulan dunia akibat kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi modern yang sangat cepat. Perbedaan internasionalisasi dan globalisasi adalah bahwa dalam internasionalisasi kedaulatan suatu negara masih memegang peranan penting, sedangkan globalisasi menumbuhkan nilai-nilai kosmopolitan, dimana proses tersebut semula bernuansa ekonomis kemudian mengandung implikasi multi dimensional, bahwa suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional dan secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Hal ini dapat diamati pada globalisasi dalam budaya (*Cultural diffusion*) sebagai dampak pertumbuhan kontak-kontak budaya sehingga menciptakan Satu standard kehidupan dan pemikiran (*World Culture*), seperti masuknya pengaruh luar khususnya budaya barat melalui media TV dan internet, budaya barat dalam bentuk konsumerisme dan cara berpakaian dan pergaulan bebas yang diikuti dan dijadikan model oleh sebagian masyarakat kita.

Memperhatikan tantangan kita sebagai bangsa, ke depan sangat dibutuhkan strategi yang jitu untuk mempertahankan dan mengembangkan integrasi nasional dalam NKRI, sehingga dapat diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam upaya memperkokoh rasa kebangsaan ditengah dinamika keragaman sosial budaya dan keragaman sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemaknaan nilai-

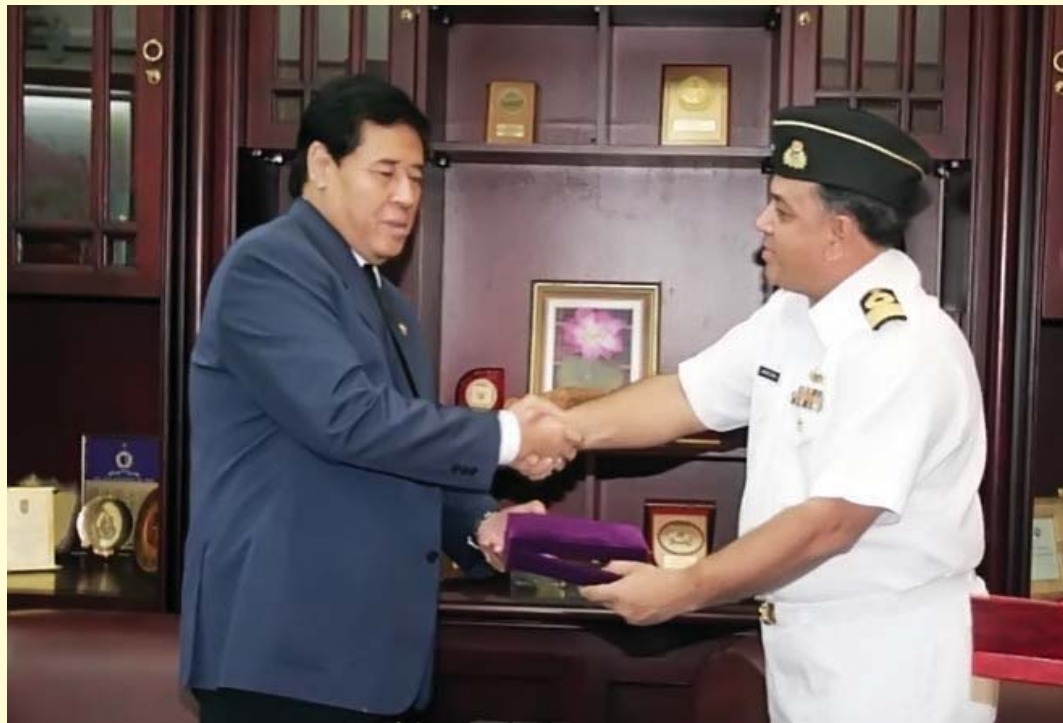
Bersambung ke hal.6



Suasana Tanya jawab mahasiswa Univ. Paramadina Di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI.

nilai kebangsaan yang bersumber dari konsensus nasional meliputi nilai-nilai ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ke-Bhineka Tunggal Ika-an dan asas NKRI yang berlangsung secara dialogis, tidak monologis. Pemaknaan nilai-nilai ideologi bangsa yang ditopang oleh pilar-pilar dan nilai-nilai kearifan lokal yang menghargai pluralisme, konstruktif, mencerminkan keanekaragaman yang berbhineka tunggal ika. Pemaknaan masing-masing pilar dari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah, merupakan manifestasi dari *Common Value* yang hidup ditengah masyarakat, akan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku masyarakat sebagai pemilik nilai-nilai ideologi yang bersifat lintas kultural sebagai benang emas (*Golden Thread*) yang menembus sekat-sekat budaya (*Cultural Barriers*). Karena itu perlu pemaknaan yang tepat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai simpul kebangsaan yang dapat mencerminkan kebersamaan, di era globalisasi yang penuh dengan turbulensi sosial dewasa ini. Kesadaran atas kebersamaan yang kuat merupakan kapital sosial yang sebenarnya memiliki akar budaya kuat di Indonesia. Tanpa itu peranan negara akan menjadi sangat lemah dan tidak efektif dilanda oleh arus globalisasi dan Regionalisasi yang cenderung semakin kuat.

KUNJUNGAN ROMBONGAN STUDENTS FROM NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY (NDU) PAKISTAN



Prof. DR. Muladi SH, sedang memberikan Cenderamata dari Pimpinan rombongan NDU Pakistan, Cdre Javaid Ghani.

Pada tanggal 20 April 2009 delegasi tamu dari NDU Pakistan melakukan kunjungan ke Lemhannas RI yang diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI dengandidampingi oleh enam pejabat teras. Pada kesempatan tersebut terjalin komunikasi akrab menyangkut bidang pendidikan dan issue penting lainnya, dan dilanjutkan tukar menukar Cenderamata. Selanjutnya rombongan melakukan diskusi, dipimpin oleh Tenaga ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Marsda TNI Surya Dharma S.Ip dengan topik "Pengenalan Lembaga dan issue – issue strategis", termasuk diskusi tentang Masalah Terorisme. Acara diskusi diikuti oleh beberapa pejabat struktural maupun fungsional serta 6 orang Perwakilan PPSA XVI Lemhannas RI terdiri dari peserta TNI, Polri, PNS, dan perwakilan Parpol sedangkan dari NDU Pakistan sejumlah 25 orang. Rombongan tamu meninggalkan Lemhannas RI setelah selesai melaksanakan makan siang bersama.

KEGIATAN UNIT E - LABKURTANNAS ICT LEMHANNAS RI

Labkurtannas adalah salah satu program Lemhannas RI khususnya di kedepuyan yaitu Debidtaplai bangs aide dasar diawali dengan peningkatan manfaat pengukuran ketahanan nasional yang semula hanya exercise academic bagi kegiatan pendidikan dan latihan menjadi instrument dan early warning. System untuk police advice bagi pemerintah dan pemerintahan daerah kedua hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI.

Pada intinya (esensi dari tupoksi Lemhannas RI adalah:

1. Mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang dituntut untuk mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan tingkat kepekaan tinggi, serta mampu memecahkan masalah-masalah secara komprehensif.
2. Memberikan masukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Presiden, berdasarkan kajian akademis.

Program ICT dilaksanakan dengan latar belakang 1. Ketahanan Nasional kita masih belum tinggi 2. Belum adanya *early warning system* yang memadai yang mengakibatkan tindakan sering terlambat. Kedua latarbelakang ini mempunyai jalan keluar yaitu diperlukannya *early warning system* yang akurat yang dapat digunakan oleh pengambilan keputusan.

6 Dasar Hukum bagi program Labkurtannas :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. UU No. 7 Tahun 2007 tentang RPJPN.
3. PP.RI No. 7 Tahun 2005 RPJMN.
4. PP.RI.No. 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasioanl.
5. PP.RI. No. 18 Tahun 2007 tentang RKP.
6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI No 01 tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Didirikannya program Labkurtannas dengan tujuan mengembangkan system pengukuran Tannas yang dapat digunakan sebagai *Early Warning System*, meningkatkan kualitas pendidikan, pengkajian dan nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan program Labkurtannas ada beberapa gambaran umum dan tahapan kegiatan. Gambaran Umum

1. Fasilitas penting yang dimiliki Lemhannas a. *Software, Hardware.*
2. *High Teghnology.* Empat tahapan Rencana Induk Kegiatan Labkurtannas 1.



PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL (LABKURTANNAS)



Ir. Kurdinanto S, M.Sc

Kompetensi Lemhannas RI sesuai tuntutan kebutuhan system nasional, betumpu pada peran dan fungsinya sebagai lembaga integrator dan/atau pencipta integrasi antar semua bidang (aspek kehidupan).

Lemhannas RI sebagai lembaga integrator baik dalam pendidikan, pengkajian, maupun pemanfaatan nilai-nilai kebangsaan, tentu banyak bekerja berdasarkan data, informasi, dan intelijen yang akurat, tepat waktu dan tepat guna. Karenanya upaya melakukan riset langsung kelapangan sesuai bidang

kajiannya menjadi suatu hal yang bersifat mutlak untuk menggali informasi yang lebih obyektif. Informasi berupa pengetahuan perlu juga digali secara maksimal dari sumber utamanya yang sah, terutama adalah pakar di bidangnya. Menggunakan system komputerisasi yang terkini, memungkinkan pola penalaran dan substansi sebuah pengetahuan dapat dipetakan secara lebih obyektif dan konsisten, bukan hanya berdasarkan persepsi. Untuk itu Lemhannas RI perlu didukung dengan system informasi yang memadai. Sistem informasi itu diperlukan untuk membangun soliditas kelembagaan, pendayagunaan sumber daya yang dimiliki lembaga secara maksimal, dan pendayagunaan sumberdaya nasional untuk memperkuat kelembagaan maupun operasional Lemhannas. Peningkatan kapasitas tugas pokok organisasi dan manajemen Lemhannas RI yang berbasis (ICT) sebagai perekat internal dan eksternal Lemhannas *incorporated* meliputi : *E-Learning, E-Office, E-Library, E-Evaluation, E-Labkurtannas, E-capacity bulding* dan *E-Procurement*.

Pada edisi ini secara singkat disampaikan satu dari 7 (tujuh) manajemen yang berbasis ICT yaitu : LABKURTANNAS.

LABKURTANNAS bertujuan mengembangkansystem pengukuran Tannas yang dapat digunakan : Sebagai *Early Warning System* dan meningkatkan kualitas pendidikan, pengkajian dan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai kata kunci kompetensi penyelesaian masalah Lemhannas terletak pada tiga ciri Identifikasinya, yaitu :

1. *Comprehensiveness* yaitu : secara pandang yang bersifat menyeluruh dalam melihat, menganalisa, dan mendapatkan solusi permasalahan nasional dan internasional.
2. *Integrativeness*, yaitu : memperhitungkan secara cermat dan konsisten, kaitan atau perilaku hubungan antar satu bidang dengan bidang lainnya.
3. *Outward looking*, yaitu : memosisikan dirinya bersifat mawas keluar, sebagai konsekuensi logis dari posisi dirinya sebagai sebuah lembaga integrator dalam level analisis bangsa-bangsa.

Sasaran pengembangan sistem informasi Ketahanan Nasional berbasis tiga pilar tersebut diatas adalah agar dapat menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat serta dapat diakses dengan mudah oleh pengguna sistem. Manfaat penting lainnya adalah membuat aturan-aturan spesifik mengenai suatu masalah berdasarkan logika dan sistematik kerja kepakaran serta memungkinkan dialog antara melalui simulasi sistem.

CERAMAH GUBERNUR LEMHANNAS RI KEPADA PESERTA SESPATI POLRI 2009 DI MABES POLRI



Gubernur Lemhannas RI memberikan ceramah di depan peserta Sespati Polri di Mabes Polri.

Secara organisatoris dan sederhana dapat dikatakan bahwa Kepemimpinan (*Leadership*) Adalah "The ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute toward the effectiveness and success of the organizations of which they are members (House, RI, 2004).

Menurut Prof. DR. Muladi, SH melalui ceramahnya, menjadi bagian pimpinan di tingkat apapun juga, lembaga apapun juga baik nasional maupun daerah, bukan saja anugerah Tuhan YME, tetapi juga mengandung "Moral Burden" yang sangat berat, karena nasib organisasi dan para pengikutnya atau yang dipimpinnya tergantung pada kualitas kepemimpinannya. Untuk itu di samping harus diimbangi dengan pengetahuan yang mendalam tentang permasalahan mendasar (*Core Problems*) pembangunan nasional atau daerahnya, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis nasional, regional dan global yang bergerak cepat karena pengaruh teknologi informasi, transportasi dan komunikasi, juga harus disertai tekad yang kuat untuk menjadi manajer dan pemimpin (*Leader*) yang profesional. Apalagi bilamana dapat mengadopsi dan mengimplementasikan secara terpadu karakteristik manajer, *Leader* dan kenegarawan dari tokoh-tokoh dunia yang pernah atau masih ada, yang pada dasarnya mencakup perpaduan antara IQ, EQ dan SQ. Bagi Indonesia sendiri, sebenarnya apabila nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kepemimpinan sebagai "Margin Of Appreciation" dalam berfikir dan berbuat, maka hampir segala karakteristik dan nilai-nilai utama seorang pemimpin dan negarawan sudah tercakup di dalamnya, karena Pancasila pada dasarnya merupakan sub sistem nilai-nilai HAM universal dan bahkan merupakan sub-sistem nilai-nilai keagamaan. Apabila membicarakan masalah manajer dan pemimpin ruang lingkungannya masih bersifat nasional/domestik yang terikat pada ruang dan waktu terbatas, sekalipun disertai dengan kemampuan yang diharapkan seperti kemampuan Transformational, Entrepreneurship, kemampuan untuk berfikir strategis, serta karakteristik kepemimpinan global (*Global Leadership*), namun di era globalisasi yang multidimensional yang

menimbulkan pro dan kontra disertai kritik telah mengakibatkan terjadinya "Global Injustice", ternyata yang dibutuhkan adalah negarawan-negarawan yang memiliki "Sense Of Politics; Sense Of Humanity; Respected By National And International Community And Individual Integrity". Dalam hal ini "Sense Of Politics" muncul karena "Political Attachment" baik dalam bentuknya berupa posisi politik yang dipunyai seseorang maupun dalam bentuk "Political Orientation, Political Attitude, And Political Outlook" yang terpuji; bahkan di era globalisasi yang multidimensional (Ekonomi, Politik, Kultural dan Teknologi) dibutuhkan apa yang dinamakan "Statesman Plus" yang memiliki karakteristik: *Wisdom of a Statesman, Quality of a Commander, Courage of a Hero, And Endurance of a Martyr*. Sehubungan dengan hal-hal di atas, Lemhannas telah melakukan Launching buku kecil tentang Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) atau Indonesian National Leadership Index (INLI)(2009), yang merupakan seleksi nilai-nilai kepemimpinan, manajerial dan kenegarawan yang praktis, rasional dan "Applicable" untuk menjadi panduan dalam melakukan seleksi atau rekrutmen kepemimpinan khas Indonesia.

Di era globalisasi saat ini, setiap negara harus mampu untuk mengembangkan prinsip kepemimpinan yang mengutamakan:

- "Safety And Security" di segala aspek kehidupan nasionalnya (Poleksosbud) dengan memperjuangkan "Globally Shared Values" dan bukan hanya taat pada "Global Standards";
- Menjaga stabilitas makro ekonomi, perlindungan sosial, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas Iptek dan sektor swasta serta daya saing lainnya;
- Pengembangan kapital dan prinsip-prinsip *Good Governance*;
- Pengembangan etika dan prinsip-prinsip demokrasi secara berkelanjutan; Memperkokoh integrasi regional sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan globalisasi guna menciptakan stabilitas, kesejahteraan dan keamanan;
- Meningkatkan peran lembaga-lembaga internasional dan regional misalnya. ASEAN dan PBB; dan
- Memandang globalisasi secara tidak berlebihan (*Hyperglobalist*), tidak meremehkan, tetapi bersifat transformasionalis dan kemampuan untuk berperan menciptakan "Globally Shared Values, Norm And Standard";

Beberapa hasil kajian multidimensi mengenai teori kepemimpinan antara lain:

- 1) Teori Pembawaan (*The Trait Theory*) yang berkembang pada tahun 1940-an dengan memusatkan diri pada pembawaan pribadi seseorang pemimpin.
- 2) Teori yang lebih menekankan pada perilaku berupa keahlian dan ketramampilan atau "State And Skill Development" yang dikenal dengan istilah "Positive Organizational Behaviorist (POB) Theories.
- 3) "Group And Exchange Theories Of Leadership", yang berakar pada

- 4) psikologi sosial.
- 4) "Contingency Theory Of Leadership" (Teori Kemungkinan).
- 5) "Path-Goal Leadership Theory", yang menganalisa dampak kepemimpinan terhadap kinerja pengikut, motivasinya, kepuasannya dan kinerjanya.
- 6) "Charismatic Leadership", yang memberikan tekanan bahwa dengan kekuatan berupa kemampuan pribadi.
- 7) "Social Cognitive Approach Theory"
- 8) "Substitutes Theory For Leadership",
- 9) "Authentic Theory Of Leadership".
- 10) *Leadership across culture theory*,
- 11) "Change Leadership".
- 12) "Visionary Leadership",
- 13) "Global Leadership",
- 14) "Transformational Leadership",
- 15) Kepemimpinan strategis (*Strategic Leadership*).

Dari hal-hal di atas selanjutnya yang diharapkan oleh bangsa Indonesia tidak hanya pemimpin yang kuat yang memiliki karakter sebagai manajer, pemimpin dan negarawan yang menghormati nilai-nilai universal, tetapi juga yang berwawasan kebangsaan kuat. Wawasan kebangsaan harus dilihat sebagai "Social Capital" (*An Instantiated Informal Norm That Promote Cooperations Between Two Or More Individual*) yang pada akhirnya menghasilkan rasa saling percaya (*Mutual Trust*) dan kokohnya jaringan sosial (*Social Network*).

Mengingat salah satu karakter negarawan adalah pengakuan universal atas karya-karyanya yang monumental, maka seorang pemimpin nasional harus berani memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan dalam menyusun atau memberikan andil atas terbentuknya "Globally Shared Values, Norms And Standard", serta harus bisa meyakinkan dunia bahwa wawasan kebangsaan Indonesia tidak sekedar merupakan elemen partikularistik semata-mata, tetapi juga merupakan sub-sistem dari nilai-nilai universal dan nilai-nilai agama. (Catatan : Bung Karno pernah pidato di depan SU PBB pada tgl. 1 Juni 1965, yang memperkenalkan Wawasan Kebangsaan Indonesia dengan judul Pidato "To Built The World A New").



Diskusi dan tanya jawab antara peserta Sespati dengan penceramah Gubernur Lemhannas RI.

SIMPOSIUM INTERNASIONAL DI NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE (NDSI) THAILAND PADA TANGGAL 2-4 SEPTEMBER 2009

(Dengan Tema : *The Constructive Knowledge for Sustainable Human Security*)



Mewakili Gubernur Lemhannas RI, Mayjen (Purn) Pandji Soesilosebagai *Guest Speaker* dalam Simposium Internasional tentang *Human Security di National Defence Studies Institute* (NDSI) yang diselenggarakan di Thailand pada tanggal 2 – 4 September 2009. Symposium dibuka oleh Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, yang dihadiri oleh kurang lebih 300 peserta dan disponsori oleh 10 lembaga lokal dan internasional seperti HDTF (*Human Development Forum Foundation*), ECDT (*European Commission Delegation to Thailand*), *Friedrich Ebert Stiftung*. Sedangkan *Keynote Address* disampaikan oleh Dr. Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN.

Pada kesempatan simposium tersebut Mayjen (Purn) Pandji Soesilo menyampaikan pokok paparan dan narasi dengan judul "*Promoting Sustainable Human Security In South East Asia, ASEAN: An Indonesian Perspective*". Tentang konsep Ketahanan Nasional (*National Resilience*) dikaitkan

dengan upaya penyelenggaraan suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia di seluruh aspek kehidupannya dalam menghadapi ancaman/tantangan *Human Security Challenges* seperti yang diuraikan pembicara sebelumnya.

Di mana Ketahanan Nasional pada hakekatnya menjadi suatu konsep Nasional dalam penyelenggaraan *Human Security* dengan pendekatan yang *comprehensive integral* dalam menghadapi ancaman "*Comprehensive Security*" dan di level ASEAN dan dunia perlu dipromosikan "*Cooperative Security*" dengan penyelenggaraan yang seimbang antara pendekatan *State Security* dan *Human Security*. Bahan Makalah disampaikan sebagai referensi dari:

1. Analisis CSIS, *issue-issue non tradisional* tentang bentuk baru ancaman keamanan.
2. *Indonesia Quarterly*, terbitan CSIS.

3. Bacaan lepas lainnya berkaitan dengan perkembangan ASEAN.
4. Ceramah Gubernur Lemhannas kepada peserta PPRA XLIII tanggal 30 Agustus 2009 tentang "Konsep Kerja Sama Keamanan (*Cooperative Security*) dalam rangka menghadapi ancaman keamanan komprehensif (*Comprehensive Security*) dan Ketahanan Nasional."

Symposium berjalan dengan lancar dan dalam diskusi para pemapar secara parsial menyinggung suatu konsep security dimana dari masing-masing negara saling memberikan tanggapan dan masukan tentang security.

Kesempatan acara di luar symposium, pada hari pertama Mayjen (Purn) Pandji Soesilo beramah tamah dengan Sekjen ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan, dan Dinner dari Gen. Narin dan staf NDSI.

PENJAJAKAN KERJASAMA PENDIDIKAN LEMHANNAS RI DENGAN UNPAD BANDUNG DAN STIA-LAN

Lemhannas RI yang diwakili oleh Tim dari Biro Kerma Settama Lemhannas RI melaksanakan peninjauan dalam rangka kerjasama pendidikan untuk tingkat S2 dan S3 dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Peninjauan kerjasama tersebut dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 24 Agustus 2009 diikuti oleh Tim dari Biro Kerma Settama Lemhannas RI dengan Dekan Fisip Unpad dan Staf beserta Dekan Fakultas Hukum dan Staf. Hasil peninjauan kerjasama dengan Fisipol Unpad disetujui hanya untuk program pendidikan Pascasarjana (S2 dan S3) yang diselenggarakan di Lemhannas RI yang dikemas dengan kegiatan tutorial dengan jumlah mahasiswa per program studi minimal 20 orang, kegiatan tutorial di Lemhannas RI akan dilaksanakan setiap hari Jum'at pukul 14.00 sampai malam dan hari Sabtu pagi sampai malam, waktu pendidikan untuk program S2 selama 1 Tahun (2 semester) meliputi : Ilmu Administrasi Negara, Hubungan Internasional, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu antropologi dan Ilmu Pemerintahan dan program S3 selama 2,5 hingga 3 Tahun meliputi : Ilmu Administrasi Publik, Sosiologi, Antropologi, Ilmu politik dan Kesejahteraan Sosial. Hasil peninjauan kerjasama dengan Fakultas Hukum Unpad meliputi program Pendidikan S1, program S2 dan program S3 jumlah mahasiswa per program studi 20 orang. kegiatan tutorial di Lemhannas RI akan dilaksanakan setiap hari Jum'at pukul 14.00 sampai malam dan hari Sabtu pagi sampai malam, waktu pendidikan untuk program S1 selama 3 tahun (6 semester) Ilmu Hukum secara Umum, program S2 selama 1 Tahun (2 semester) meliputi : Hukum Bisnis, Hukum Pidana, HAM, Hukum Internasional, Hukum Ketatanegaraan, Hukum Kesehatan. dan program S3 selama 3 Tahun meliputi ; Hukum Bisnis, Hukum Pidana, HAM, Hukum Internasional, dan Hukum Ketatanegaraan. Peninjauan kerjasama juga telah dilaksanakan dengan STIA LAN Jakarta untuk penyelenggaraan program Pendidikan Administrasi Negara dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan *Memorandum of Understanding* (MOU).

KEGIATAN WASRIK INTERNAL DI LEMHANNAS RI



Rapat Pembahasan tentang Wasrik di Lemhannas RI dipimpin oleh Inspektur Lemhannas RI Brigjen Polisi Drs. Alpiner Sinaga

Pada tanggal 18 Agustus s/d 25 September 2009 Inspektorat Lemhannas RI telah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) internal kepada setiap unit kerja yang ada di Lemhannas RI, seperti di Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, Debidik Pimp. Tk. Nas, Debidjian Strat, Debid Taplai kebangsaan, dan Koperasi Primer Lemhannas RI.

Dalam melaksanakan wasrik tersebut Inspektorat Lemhannas RI menugaskan para Auditornya sesuai bidang tugas masing-masing khususnya Auditor Perbendaharaan. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, melaksanakan pengawasan fungsional, yang dilakukan melalui Wasrik terhadap kinerja, keuangan dan pengawasan, serta dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai wujud mendukung tercapainya *Clean Government*.

Pelaksanaan Wasrik tersebut merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Inspektorat Lemhannas RI yang berada dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lemhannas RI.

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si. **Penanggung Jawab :** Brigjen TNI Kusworo,
Redaktur : Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, MH, M.Sc **Penyunting/Editor :** Djoko Saksono,
 Kolonel Caj. M. Sochib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, MM, Mayor Inf. Risnal SH. MA.

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari. , Mayor Caj (K) Rita Ratnayu

Desain Grafis & Fotografer : Arief Musadayan, Arianto, Maulana Hendrik, **Sekretariat :** Syafrizal, Gatot

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926